
**THE INFLUENCE OF REGIONAL ORIGINAL INCOME AND BALANCING FUNDS ON THE
FINANCIAL PERFORMANCE OF DISTRICT/CITY GOVERNMENTS IN
JAMBI PROVINCE IN 2018-2021**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAMBI TAHUN 2018-2021**

Oleh:

Ari Nugroho^{*1)}, Yuliusman²⁾, Riski Hernando³⁾

¹⁾ Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi – Indonesia

^{2.&3)} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi – Indonesia

Email: arinugroho.feb@gmail.com^{*1)}, yuliusman@unja.ac.id²⁾, riskihernando@unja.ac.id³⁾

* Korespondensi

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk: 08 Maret 2023

Artikel Diterima: 31 Juli 2023

ABSTRACT

This research is entitled The Effect of Regional Original Income and Balancing Funds on the Financial Performance of District and City Governments in Jambi Province in 2018–2021. The population of this study is the district and city local governments in Jambi Province in 2018–2021. The sampling technique uses purposive sampling, where the sample is determined based on what is determined. In line with that, there are 9 districts or cities in Jambi Province where samples were taken for 4 years. in order to obtain 36 observational data points. The data in this research is secondary data. The data analysis tool used in this study was the SPSS version 24 program. The results showed that local revenue had a positive and significant effect on regional government financial performance, and balancing funds had a significant effect on regional government financial performance.

Keywords: Regional Own Revenue, Balancing Funds, Local Government Financial Performance

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2018-2021. Populasi pada penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jambi tahun 2018-2021. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling* di mana sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan, sejalan dengan itu ada 9 kabupaten/kota di provinsi jambi sebagai sampel yang diambil selama 4 tahun. Sehingga diperoleh 36 data pengamatan. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah program SPSS versi 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran yang dimainkan oleh pemerintah daerah dalam membentuk kembali daerah mereka sendiri untuk melaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah istilah umum untuk hak, tanggung jawab, dan wewenang yang diberikan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri untuk kepentingan masyarakatnya sendiri.

Dengan memanfaatkan sumber daya yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, efisiensi dan efektivitas dapat tercapai. Penyampaian pelayanan kepada masyarakat di pemerintah daerah menunjukkan efisiensi dan efektifitas. Tindakan pemerintah tercermin dari seberapa baik pemerintah melayani masyarakat. Jika pemerintah daerah dapat secara efektif mengelola potensi daerah yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, maka kinerja tersebut dapat tercapai.

Kinerja pemerintah yang efektif tidak selalu sesuai dengan harapan publik. Karena pemerintah hanya menjalankan program-program yang berhasil dan seringkali mengekspos yang tidak berhasil, maka kinerja pemerintah daerah seperti yang telah digambarkan selama ini cenderung artifisial dan bias.

Analisis kinerja pemerintah daerah merupakan data yang sangat penting, terutama untuk merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan menentukan apakah pemerintah daerah telah mengelola

keuangannya secara efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Hamid, 2018). Bagian pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dari laporan keuangan pemerintah daerah berperan dalam bagaimana kinerja keuangan dianalisis. Sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia sering bergumul dengan persoalan serupa, terutama terkait keuangan daerah terkait PAD yang belum berdampak besar terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan. Ketidakmampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya, yang dibuktikan dengan rendahnya pendapatan asli daerah yang dihasilkan untuk membiayai belanja daerah, berpotensi mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah yang pada akhirnya akan menimbulkan ketimpangan sosial dan kesenjangan kemiskinan.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi 2018). Dalam sektor publik, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang ingin atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Berikut informasi tentang Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang akan di uji dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2018-2021 (Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Keterangan	2018	2019	2020	2021
Jambi	PAD	338,89	393,43	355,67	384,73
	DP	1128,71	1121,47	1074,21	1070,42
Sungai Penuh	PAD	34,18	34,90	29,05	59,11
	DP	636,56	707,42	667,01	641,76
Batanghari	PAD	98,81	91,57	104,23	148,44
	DP	1002,45	1097,25	987	1087,36
Bungo	PAD	133,85	140,33	126,13	198,75
	DP	1017,13	1075,2	1008,97	977,20
Kerinci	PAD	80,48	85,90	81,67	66,89
	DP	1025,95	1089,75	1025,72	1018,27
Merangin	PAD	89,30	106,16	100,32	107,88
	DP	1127,06	1253,01	1143,68	1138,07
Muaro Jambi	PAD	90,31	93,79	92,80	110,75
	DP	1121,41	1175,58	1107,56	1151,34
Sarolangun	PAD	118,83	94,62	70,10	63,59
	DP	1007,93	1109,89	974,57	964,13
Tanjung Barat	PAD	101,84	120,22	115,56	118,53
	DP	1186,17	1412,34	1194,49	1375
Tanjung Timur	PAD	49,61	53,92	49,65	81,60
	DP	994,35	1040,5	915,51	994,13
Tebo	PAD	76,16	83,24	78,46	92,92
	DP	924,83	947,44	891,78	950,57

Sumber: Data Diolah Peneliti

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Diketahui

bahwa PAD yang terendah yaitu 29,05 dan dana perimbangan yaitu 636,56. Untuk nilai PAD tertinggi

yaitu 393,43 dan dana perimbangan yaitu 1412,34. Ketergantungan daerah terhadap dana dari pemerintah pusat masih tinggi karena hasil transfer dana berupa dana perimbangan masih mendominasi daripada pendapatan asli daerah. Besarnya dana dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan daerah menjadi akar dari tingginya ketergantungan terhadap dana tersebut. Kapasitas suatu daerah untuk mengidentifikasi dan mengelola sumber daya keuangannya masih rendah.

Fenomena yang di amati dalam penelitian ini masih menunjukkan besarnya kontribusi dana perimbangan daripada pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk menilai seberapa baik kinerja pemerintah daerah secara finansial dalam mengelola sumber daya keuangan daerah. Dimungkinkan untuk membandingkan jumlah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan untuk semua kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, serta pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Ardedia dkk. (2022), Digdowiseiso dkk., (2022), Widajanto dkk., (2022), Maramis dan Rahayu (2022), Nauw dan Riharjo (2021), Prastiwi dan Aji (2020) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Niswani dkk., (2022), Azhar (2021), Andjarwati dkk., (2021) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardedia dkk., (2022), Digdowiseiso dkk., (2022), Widajanto dkk., (2022), Andjarwati dkk., (2021), Prastiwi dan Aji (2020) menjelaskan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Maramis dan Rahayu (2022), Niswani dkk., (2022) dan Nauw dan Riharjo (2021) menjelaskan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Peneliti melakukan penelitian pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2018-2021 karena terdapat masalah mengenai Kinerja Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan sesuai dengan yang tertera di atas. Perbedaan nilai PAD dan Dana Perimbangan tiap daerah tentunya memiliki dampak yang berbeda pula pada pertumbuhan ekonomi maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah PAD dan Dana Perimbangan terdapat pengaruh atau tidak terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2021 ?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2021?

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2021.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Kekayaan daerah adalah harta atau sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah salah satu jenis pendapatan daerah yang bersumber dari daerah dan digunakan sebagai modal dasar bagi pemerintah daerah untuk membiayai prakarsa daerah untuk mengurangi ketergantungan pada pendanaan pusat. Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kemampuan keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari kontribusi PAD terhadap upaya untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan dengan itu, untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah selain dari pajak dan retribusi daerah tetapi juga dari pemanfaatan aset dalam bentuk tanah dan atau bangunan yang idle.

2.1.2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali. Menurut Siregar (2015) menjelaskan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Putri dan Darmayanti (2019) bahwa semakin besar dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat, maka dapat mencerminkan semakin besar ketergantungan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerah sehingga kemampuan daerah tersebut dalam menggali potensi dari daerah sendiri semakin rendah. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin besar dana perimbangan yang diperoleh akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut menurun. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah pusat dengan daerah. Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019, Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Menurut Nauw dan Riharjo (2021) Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk mencapai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai daerahnya.

2.1.3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil kegiatan dan program pemerintah yang dimaksudkan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran secara kuantitas dan kualitas yang terukur disebut sebagai kinerja pemerintah. Fahmi (2018) menjelaskan Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

a) Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Indikator Kinerja Pemda, meliputi indikator input, indikator proses, indikator output, indikator outcome, indikator benefit dan indikator impact.

b) Analisis Rasio Keuangan

Menurut Halim (2014) menjelaskan membandingkan hasil dari satu periode ke periode sebelumnya memungkinkan identifikasi tren dalam analisis keuangan. Ada beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain:

1. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

4. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang diharapkan. Adapun kategori nilai efektivitas PAD sebagai berikut :

- Sangat efektif : >100%
- Efektif : 100%
- Cukup efektif : 90%-99%
- Kurang efektif : 75%-89%
- Tidak efektif : <75%

Rasio efisiensi dihitung dengan cara membandingkan biaya perolehan dengan realisasi penerimaan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD. Secara umum efisiensi PAD dikategorikan sebagai berikut :

- Sangat efisien : <10%
- Efisien : 10%-20%
- Cukup efisien : 21%-30%
- Kurang efisien : 31%-40%
- Tidak efisien : >40%

5. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%. Rasio efektivitas pajak daerah dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan apabila rasio yang dicapai kurang dari 10%. Rasio efisiensi pajak daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Jumlah dana yang diperoleh meningkat dengan PAD di daerah tertentu dapat memperkecil ketergantungan dana dari pusat. Dengan

menyediakan program dan kegiatan pembangunan daerah, PAD dalam jumlah yang signifikan dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

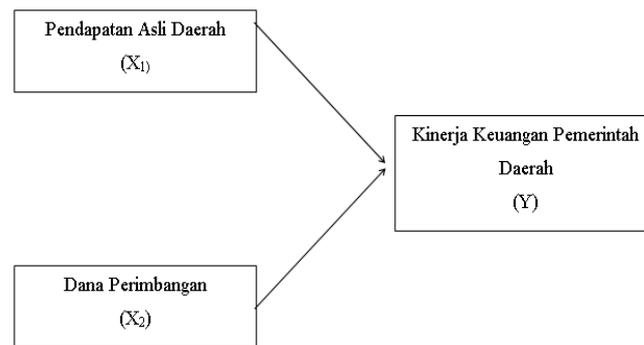
Penelitian yang dilakukan oleh Ardelia dkk. (2022), Digdowiseiso dkk., (2022), Widajanto dkk., (2022), Maramis dan Rahayu (2022), Nauw dan Riharjo (2021), Prastiwi dan Aji (2020), Sarmento dan Sudiarta (2020) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Niswani dkk., (2022), Azhar (2021), dan Andjarwati dkk., (2021) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan asumsi jika semakin tinggi tingkat kekayaan yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemda, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut.

2.2.2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan dari sumber luar disebut sebagai dana perimbangan. Untuk menghilangkan kekhawatiran pembiayaan antar daerah, digunakan dana perimbangan. Pemerintah pusat akan memantau penggunaan dana perimbangan ini. Semakin besar dana perimbangan, semakin diperlukan pengawasan pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah akan melaksanakan program kerjanya dengan lebih hati-hati. Akibatnya, pendanaannya berasal dari sumber luar, hal itu akan mendorong pemerintah daerah untuk bekerja lebih baik sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangannya. Dana perimbangan yang lebih banyak berarti kontrol pemerintah pusat yang lebih ketat, yang membuat pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam menjalankan program kerjanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardelia dkk., (2022), Digdowiseiso dkk., (2022), Widajanto dkk., (2022), Andjarwati dkk., (2021), Prastiwi dan Aji (2020), Sarmento dan Sudiarta (2020) menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Maramis dan Rahayu (2022), Niswani dkk., (2022) dan Nauw dan Riharjo (2021) menunjukkan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Perlu dilakukan pengembangan instrumen yang dapat meningkatkan potensi daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan juga dana transfer dari pusat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam mengelola keuangannya.

2.3. Model Penelitian



Sumber: Data diolah peneliti

Gambar 1. Model Penelitian

2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H₁**= Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- H₂**= Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif untuk membuktikan adanya pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2). Sedangkan variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Data diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran.

Populasi penelitian ini adalah 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Sampel yang digunakan adalah 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

3.1. Pengukuran dan Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data yang diambil adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

Aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah SPSS versi 24. Data tersebut diolah terlebih dahulu menggunakan microsoft excel 2010 yang akan di input ke dalam aplikasi SPSS versi 24.

Penelitian ini menggunakan analisis data berupa analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda. Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Sebelum dilakukan uji hipotesis, dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik agar penelitian yang dilakukan tepat. Pada penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi. Uji Hipotesis yang digunakan adalah uji t parsial.

Tabel 2. Operasional Variabel dan Pengukuran

Variabel	Definisi Variabel	Indikator Variabel	Skala
Variabel Dependen (Y) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Menurut Halim (2012), Salah satu indikator kemampuan daerah dalam mengawal otonomi daerah adalah kinerja keuangan. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di ukur dengan menggunakan Rasio Kemandirian. Rasio Kemandirian adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Menurut Mahmudi (2019), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pusat dan pinjaman daerah. Semakin	Rasio Kemandirian $\frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$ Mahmudi, (2019)	Rasio

	tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rumus untuk menghitung rasio kemandirian adalah sebagai berikut :		
Variabel Independen (X1) Pendapatan Asli Daerah	Dengan menggunakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari potensi yang ada di daerah tertentu (Nauw dan Riharjo, 2021). PAD yang tinggi dimiliki oleh pemerintah daerah akan memudahkan kinerja atas transaksi pengeluaran atau belanja daerah sebagai kebutuhan Pemerintah daerah. PAD merupakan sumber dana yang diperoleh dari daerahnya sendiri serta menggambarkan potensi suatu daerah. rumus untuk menghitung PAD adalah sebagai berikut:	Pendapatan Asli Daerah = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan + Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Nauw dan Riharjo (2021)	Rasio
Variabel Independen (X2) Dana Perimbangan	Penelitian yang dilakukan oleh Nauw dan Riharjo (2021) menjelaskan, Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk mencapai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai daerahnya. Rumus untuk menghitung dana perimbangan adalah sebagai berikut :	Dana Perimbangan = Dana Bagi Hasil + Dana Alokasi Umum + Dana Alokasi Khusus (Nauw dan Riharjo, 2021)	Rasio

Sumber: Data Diolah Peneliti

3.2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis yang digunakan oleh peneliti untuk menguji data yang telah dikumpulkan. Alat untuk menguji data tersebut adalah dengan menggunakan program *Statistical Package Sciences (SPSS) for windows version 24*.

3.2.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Analisis deskripsi bertujuan memberikan penjelasan mengenai variabel-variabel yang akan diamati. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi.

3.2.2. Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2018) uji asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum analisis regresi linear berganda. Dilakukannya pengujian ini untuk dapat memberikan kepastian agar koefisien regresi tidak bias serta konsisten dan memiliki ketepatan dalam estimasi. Uji asumsi klasik terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

3.2.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2018), Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen. Tujuan utama analisis regresi linear berganda adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi tahun 2018-2021.

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

3.2.4. Uji Hipotesis

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas atau independen dalam menerangkan variasi-variabel dependen (Ghozali, 2018). Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

- Nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- Nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskripsi bertujuan memberikan penjelasan mengenai variabel-variabel yang akan

diamati. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. Hasil analisis deskriptif adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
Ket	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
PAD	36	63,59	393,43	132,09	88,74947
DP	36	891,78	1412,34	1082,33	113,51340
KUPD	36	,06	,36	,12212	,08091
N	36				

Sumber: Output SPSS 24 (2023)

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa variabel independen PAD memiliki nilai minimum 63,59 dan nilai maksimum sebesar 393,43. Nilai mean sebesar 132,09 dan standar deviasi sebesar 88,74947.

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa Dana Perimbangan (DP) memiliki nilai minimum 891,78 dan nilai maksimum 1412,34. Nilai mean sebesar 1082,33, dan standar deviasi sebesar 113,51340.

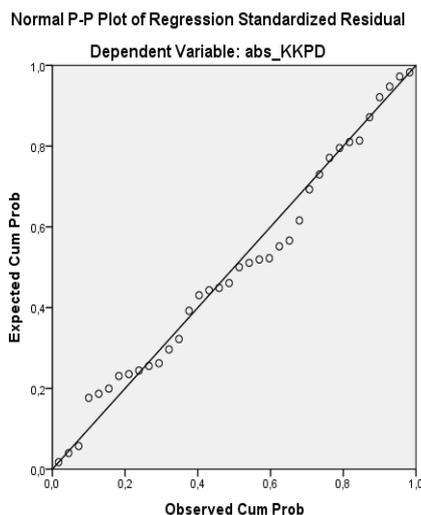
Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KUPD) memiliki nilai minimum 0,06 dan nilai maksimum 0,36. Nilai mean sebesar 0,12212, dan standar deviasi

0,08091. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah adalah rasio kemandirian yang dimana total Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan total Dana Perimbangan.

4.1.2. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018), Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residu memiliki distribusi normal. Pada pengujian normalitas peneliti menggunakan analisis grafik normal probability plot dan uji *Kolmogorov-Smirnov*.



Sumber: Output SPSS 24 (2023)

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Gambar 2 di atas diketahui data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola

distribusi normal, maka dapat disimpulkan data memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4. Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,01550645
Most Extreme Differences	Absolute	,107
	Positive	,099
	Negative	-,107
Test Statistic		,107
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Output SPSS 24 (2023)

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar

variable bebas. Nilai yang dipakai untuk menunjukkan tidak adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance > 0,10 atau sama denga nilai VIF < 10,00.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pendapatan Asli Daerah	,958	1,044
	Dana Perimbangan	,958	1,044

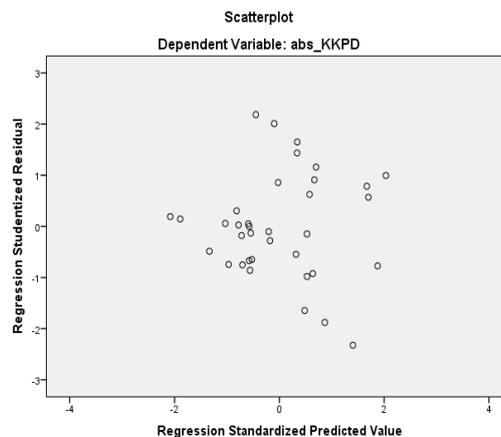
Sumber: Output SPSS 24 (2023)

Tabel 5 di atas menunjukkan Berdasarkan hasil Uji Multikolinearitas dapat dilihat bahwa nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dari masing-masing variabel independen adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,044 dan Dana Perimbangan sebesar 1,044 nilai VIF tersebut kurang dari 10,00. Nilai tolerance yang terbentuk adalah 0,958 dan 0,958 data tersebut lebih dari 0,10. Hasil penelitian untuk uji multikolonieritas dapat disimpulkan bahwa model

regresi layak digunakan dan tidak terjadi multikolonieritas.

c) Uji Heteroskedasitas

Uji Heteroskedasitas digunakan menguji apakah dalam model regresi penelitian adanya ketidaksamaan variance dari residual antar satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Pengujian Heteroskedasitas didasarkan pada *Scatterplot*.



Sumber: Output SPSS 24 (2023)

Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedasitas

Gambar 3 di atas menunjukkan data berada diatas atau dibawah dari 0 dan data lebih cenderung menyebar dan tidak membentuk pola - pola tertentu maka dapat disimpulkan pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedasititas pada penelitian ini.

Cases >= Test Value	18
Total Cases	36
Number of Runs	14
Z	-1,522
Asymp. Sig. (2-tailed)	,128

Sumber: Output SPSS 24 (2023)

d) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode t -1 sebelumnya. Pengujian ini menggunakan Uji Runs Test sebagai uji autokorelasi.

Tabel 6. Hasil Uji Runs Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	,00105
Cases < Test Value	18

Pada tabel 6 di atas bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,128 > dari 0,05, Maka..dapat disimpulkan..bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi ini.

4.1.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Model yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berikut adalah hasil pengujian regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	,416	,186	
	ln_PAD	,171	,006	1,003
	ln_DP	-,158	,027	-,198

Sumber: Output SPSS 24 (2023)

Berdasarkan tabel 7 di atas, dapat diketahui persamaan regresi linear berganda yang dapat dirumuskan pada penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = 0,416 \alpha + 0,171 (X1) - 0,158 (X2) + e$$

X1 = Pendapatan Asli Daerah

X2 = Dana Perimbangan

Adapun interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

Nilai konstanta (α) sebesar 0,416. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pendapatan asli daerah dan dana perimbangan bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan, maka nilai kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat sebesar 0,416.

Nilai koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 0,171 menunjukkan bahwa apabila

PAD meningkat sebesar satu satuan yang menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat sebesar 0,171. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.

Nilai koefisien regresi variabel Dana Perimbangan (X2) sebesar -0,158. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif antara Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel Dana Perimbangan meningkat sebesar 1%, maka variabel kinerja pemerintah daerah mengalami penurunan sebesar -0,158. Dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap konstan.

4.1.4 Uji Hipotesis

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas atau independen dalam menerangkan variasi-variabel dependen (Ghozali, 2018). Hasil pengujian variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Parsial t

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	2,231	,033
	ln_PAD	29,416	,000
	ln_DP	-5,807	,000

Sumber: Output SPSS 24 (2023)

Berdasarkan tabel 8 di atas, Pengujian Hipotesis melalui uji t tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai Pendapatan Asli Daerah (X1) t hitung $29,416 > t$ tabel $2,035$ atau dengan nilai signifikan (sig) $0,000 < 0,05$. Sehingga H1 diterima yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

b. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai Dana Perimbangan (X2) t hitung $-5,807 < t$ tabel $2,035$ atau dengan nilai signifikan (sig) $0,000 < 0,05$. Sehingga H2 diterima yaitu Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai Pendapatan Asli Daerah (X1) t hitung $29,416 > t$ tabel $2,035$ atau dengan nilai signifikan (sig) $0,000 < 0,05$. Sehingga H1 diterima yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Pendapatan asli daerah yang tinggi akan berdampak pada keputusan yang diambil oleh aparat pemerintah dan penyediaan pelayanan sosial. Karena pemerintah daerah tidak lagi mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. Sebagai akibat dari efisiensi pemerintah daerah, hal ini akan menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Semakin tinggi kekayaan daerah mampu mengurangi jumlah dana yang bergantung pada daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diperkirakan akan meningkat dengan bertambahnya kekayaan yang diukur dari besarnya total aset pemerintah daerah.

Penelitian ini sejalan dengan Ardedia dkk. (2022), Digdowniseiso dkk., (2022), Widajanto dkk., (2022), Maramis dan Rahayu (2022), Nauw dan Riharjo (2021), Prastiwi dan Aji (2020), Sarmiento dan Sudiarta (2020) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2.2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai Dana Perimbangan (X2) t hitung $-5,807 < t$ tabel $2,035$ atau dengan nilai signifikan (sig) $0,000 < 0,05$. Sehingga H2 diterima yaitu Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Hal ini disebabkan karena dana perimbangan tidak cukup untuk membantu dana daerah yang menjadi kewenangannya dan menurunkan biaya pendanaan yang terkait dengan pemerintahan antar daerah. Menurut penelitian, pencapaian standar pelayanan minimal di setiap daerah dapat dipertahankan dengan dana perimbangan. Dalam rangka meningkatkan total pendapatan daerah dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah, dana perimbangan akan disetorkan ke rekening pendapatan daerah. Maka dari itu perlu adanya peningkatan agar dana perimbangan pada suatu daerah meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Ini berarti bahwa ketika lebih banyak dana datang dari pusat, pemerintah daerah menunjukkan situasi keuangan yang kurang baik bagi pemerintah daerah kemandirian terbatas karena daerah tidak memiliki kebebasan untuk menggunakan sumber daya ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardedia dkk., (2022), Digdowniseiso dkk., (2022), Widajanto dkk., (2022), Andjarwati dkk., (2021), Prastiwi dan Aji (2020), Sarmiento dan Sudiarta (2020) menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi.
2. Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut, antara lain:

1. Peneliti menyarankan peneliti selanjutnya dapat mengambil objek penelitian yang berbeda, misalnya perusahaan yang bergerak di sektor keuangan, selain itu peneliti selanjutnya dapat menambah tahun pengamatan, agar data yang diperoleh lebih beragam.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah atau menggunakan variabel independen lain untuk melihat pengaruhnya terhadap kinerja keuangan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Hamid, A. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka – Jawa Barat Jurnal Sekuritas Prodi Manajemen Unpam. Jurnal Sekuritas, 11(44), 38–51.

- Andjarwati, T., Budiarti, E., Soemadijo, P. S., & Yasin, M. (2021). Analysis of Local Own Revenue and Balancing Funds on the Financial Performance of Districts and Cities in the Region of East Java Province. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 13(1), 235–250. <https://doi.org/10.34109/ijefs.202112233>
- Azhar, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(02), 164–174. <https://doi.org/10.56196/jta.v11i02.190>
- Bastian, I. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta : PT. Penerbit Erlangga.
- Ester Trivona Nauw, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-17.
- Fahmi, I. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan: Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan*. Alfabeta.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hilda Kumala, Ardelia, M., & Wulandari, I. N. (2022). Pengaruh Pendaptan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020). 7(1), 60–81. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.165>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Maramis, A., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Provinsi Di Indonesia Tahun 2020) The Effect Of Regional Original Revenue , General Allocation Fund , And Balance Funds On. 9(4), 1998–2006.
- Niswani, N., Ikhyanuddin, I., Firdaus, R., & Nurhasanah, N. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(1), 65. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6367>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pratiwi, T. Y. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2018.
- Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5), 2834. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i05.p09>
- Siregar, Baldric. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Widajanto, M. B., Dewi, P. P., & Anggraeni, R. F. D. A. (2022). The Influence of Regional Original Revenues, Balancing Funds and Capital Expenditures on the Financial Performance of Regency/City Regional Governments of East Java Province. *Indonesia Accounting Research Journal*, 10(2), 40–47.
- <https://djpk.kemenkeu.go.id>. (diakses tanggal 13 November 2022)